BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis dan Administratif di Kota Jambi

Kota Jambi pada umumnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi, dimana bagian Utara, Barat, Selatan dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Muaro Jambi. Kota Jambi terletak pada ketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter di atas tanah laut. Letak geografis Kota Jambi terletak di: 01030'2,98"-01040' 1,07" Lintang Selatan dan 10340' 1,67"-10340' 0,22" bujur timur. Bagian bergelombang berada di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa mengelilingi Sungai Badanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera, dengan total panjang sekitar 1.700 kilometer, dari Danau Atas-Danaubava (Sumatera Barat) hingga Berhala. Selat (11 km) di Kota Jambi memiliki lebar sekitar 500 m. Sungai Batangas membelah Kota Jambi menjadi dua bagian yaitu utara dan selatan.

Luas Kota Jambi 205,38 Km yang terdiri dari:

1. Kecamatan Kota Baru = 36,11Km (17,56%)
2. Kecamatan Alam Barajo = 41,67 Km (20,27 %)
3. Kecamatan Jambi Selatan = 11,41 Km (5,55 %)
4. Kecamatan Paal Merah = 27,13 Km (13,20 %)
5. Kecamatan Jelutung = 7,92 Km (3,85 %)
6. Kecamatan Pasar Jambi = 4,02 Km (1,96 %)
7. Kecamatan Telanaipura = 22,51 Km (10,95 %)
8. Kecamatan Danau Sipin = 7,88 Km (3,83 %)

9. Kecamatan Danau Teluk = 15,70 Km (7,64 %)

Luas Keseluruhan kota jambi yakni 20.538 hektar. Terdiri dari 11 kecamatan dan 62 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi wilayah Kota Jambi dan batas administrasinya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan berikut ini.

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT
1. Kota Baru	36.11	17.56	5	171
2. Alam Barajo	41.67	20.27	5	191
3. Jambi Selatan	11.41	5.55	5	149
4. Paal Merah	27.13	13.20	5	217
5. Jelutung	7.92	3.85	7	233
6. Pasar Jambi	4.02	1.96	4	58
7. Telanaipura	22.51	10.95	6	126
8. Danau Sipin	7.88	3.83	5	150
9. Danau Teluk	15.7	7.64	5	44
10. Pelayangan	15.29	7.44	6	46
11. Jambi Timur	15.94	7.75	9	192
Jumlah / Total	205.58	100.00	62	1,577

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jambi

Berdasarkan tabel 4.1, data tersebut merupakan Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administratif menurut Kecamatan di Kota Jambi pada sensus penduduk tahun 2016. Dilihat sebaran penduduk menurut kecamatan, ternyata penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Alam Barajo dengan Persentase jumlah penduduk sekitar 20.27% jumlah penduduk Kota Jambi. Ada kecenderungan bahwa konsentrasi penduduk di perkotaan tidak berdasarkan

aktivitas/pekerjaan, sebagian besar penduduk perkotaan memiliki tempat tinggal berbeda dengan wilayah aktivitas/pekerjaan, dengan demikian penyebaran penduduk lebih menggambarkan tempat tinggal.

4.2 Aspek Budaya dan Masyarakat di Kota Jambi

Sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi, tentunya Kota Jambi menjadi pusat administrasi dan sosial ekonomi, struktur penduduk Kota Jambi sama dengan pusat kota lainnya, yaitu heterogen atau terdiri dari berbagai etnis. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan.

Sebagai kota bisnis berkembang dan tumbuh, Dengan berbagai sarana dan prasarana menjadi daya tarik wisata Migrasi daerah. Selain kondisi tersebut, perkembangan pluralisme Di Kota Jambi, kepribadian masyarakat adat juga mendukung kecenderungan mereka untuk Membuka atau menerima imigrasi dan budaya dari luar. Peran ini telah menjadi bagian dari proses pembangunan perkotaan Jambi, karena Kota Jambi dibentuk oleh budaya material dan budaya spiritual saat itu Berbagai bangsa, kelas sosial, ekonomi dan sistem pemerintahan di masa lalu. Saat ini keragaman kelompok etnis Kota Jambi diisi oleh kelompok etnis Melayu, Jawa, Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, Bali, Banjar, Bugis, Flores, Arab, India, dan Tionghoa dan kelompok garis keturunan ini membentuk persatuan. Berdasarkan data dari Kantor Kesbangpol Kota Jambi, terdapat 14 persatuan kelompok etnis yang terdaftar, yaitu :

- a. Wisnu Murti Kota Jambi
- b. Persatuan Keluarga Daerah Pariaman
- c. Forum Rembuk Batak Kota Jambi
- d. Kerukunan Keluarga Banjar
- e. Persatuan Masyarakat Aceh
- f. Yayasan Kesejahteraan Sentosa
- g. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan
- h. Lembaga Adat Melayu Kota Seberang
- i. Himpunan Masyarakat Jambi Asal Sumatera Selatan
- j. Himpunan Masyarakat India
- k. Himpunan Masyarakat Arab
- l. Himpunan Masyarakat Bali
- m. Himpunan Masyarakat Sunda
- n. Perhimpunan Tionghoa Islam Indonesia

Intensitas kegiatan dan pembedaan suku-suku tersebut sangat terlihat tergantung dari jumlah penduduk asli yang tinggal di Kota Jambi. Biasanya paguyuban yang terbentuk, tidak terbagi lagi kedalam paguyuban-paguyuban pada lingkup lebih kecil seperti lingkup kabupaten. Pengelompokan masyarakat yang paling terlihat di Kota Jambi adalah kelompok masyarakat asli, yaitu kelompok masyarakat yang berasal dari seberang Kota Jambi dan masyarakat pendatang yang merupakan masyarakat yang berasal dari luar wilayah awal pertumbuhan Kota Jambi. Masyarakat pendatang terkelompokkan lagi menjadi kelompok pendatang Tionghoa dan kelompok non Tionghoa.

4.3 Kawasan Rawan Bencana Alam Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 9 tahun 2013 membagi kawasan rawan bencana di Kota Jambi menjadi kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran.

Kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi Kecamatan Telanaipura; Kecamatan Pasar Jambi; Kecamatan Jambi Timur; Kecamatan Danau Teluk; dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan Kawasan rawan bencana kebakaran dijabarkan sebagai berikut : Kec. Danau Teluk : Kel. Pasir Panjang; Kel. Tanjung Raden; Kel. Tanjung Pasir; Kel. Olak Kemang; Kel. Ulu Gedong Kec. Pelayangan : Kel. Tengah; Kel. Jelmud; Kel. Mudung Laut; Kel. Arab Melayu; Kel. Tahtul Yaman dan Kel. Tanjung Johor Kec. Telanaipura : Kel. Murni; Kel. Solok Sipin; Kel. Legok Kec. Pasar Jambi : Kel. Pasar; Kel. Orang Kayo Hitam; Kel. Sungai Asam dan Kel. Beringin Kec. Jambi Timur : Kel. Rajawali; Kel. Budiman; Kel. Kasang; Kel. Sulanjana; Kel. Tanjung Pinang Kec. Jelutung : Kel. Cempaka Putih dan Kel. Lebak Bandung Kec. Kota Baru : Kel. Kenali Asam Atas dan Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Jambi Selatan : Kel. Tambak Sari.

4.4 Dana Hibah di Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 27 tahun 2016, tentang penyelenggaraan hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi, bahwa Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: tata cara pengajuan hibah, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah di

lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang bersumber dari APBD. Dalam hal ini Hibah yang dimaksud dapat diberikan Oleh: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD serta Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Kategori Belanja Hibah berupa uang, barang dan jasa.

Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud berbentuk : a.) tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya; b.) hewan dan tumbuhan; dan c). aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak. Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya. Tujuan dengan pemberian Hibah itu sendiri, Pemerintah Kota Jambi memiliki target dan Indikator kerja diantaranya yaitu seperti : a) Menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan prioritas kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. b) Kebutuhan yang diajukan dalam rencana anggaran biaya usulan/proposal memperhatikan asas kewajaran pada anggaran biaya kebutuhan nyata usulan terkait, dengan mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Jambi. c) Kewenangan dan evaluasi yang ada pada SKPD dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku atas usulan pemohon dan direkomendasikan ke Walikota melalui TAPD.

4.5 Belanja Bantuan Sosial di Kota Jambi Kota Jambi

Pemerintah Kota Jambi dengan anggaran Belanja Bantuan sosial memiliki rencana kerja dan program yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat di Kota Jambi, terutama masyarakat miskin. Perkembangan Program sosial pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

4.1 Indikator kerja dan Rencana Aksi anggaran Bantuan Sosial tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	Target Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penanggulangan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	-	2,243,600,000
2	Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat	3000 jiwa dan 1 Kali Pemantapan TAGANA	383,600,000
3	Kegiatan Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Sosialisasi Pengenalan BPNT bagi anggota PKH	195,000,000
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Sosialisasi Bagi Anggota PSM,TKSK,LK3, Karang Taruna	180,000,000
5	Kegiatan Pembinaan dan pelayanan sosial bagi orang terlantar	Pemulangan Orang Terlantar Sebanyak 250 Orang	120,000,000
6	Kegiatan Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial dan lansia	Sosialisasi Bimbingan Mental Bagi anak yang bermasalah sosial	110,000,000
7	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial	Monitoring PMKS dan Pembinaan Mental	385,000,000
8	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi disabilitas, korban napza	Pelatihan wirausaha Bagi Disabilitas dan Pemberian bantuan kursi roda sebanyak 7 Buah	140,000,000
9	Kegiatan Pelayanan dan pembinaan kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Sosialisasi Bagi generasi muda	80,000,000
10	Kegiatan Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial	Sosialisasi Bagi masyarakat Tentang Pungutan Sumbangan Sosial	80,000,000

11	Kegiatan Pendataan dan informasi fakir miskin	Sosialisasi Tentang MPM dan Bimtek	250,000,000
12	Kegiatan Penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin	Pelatihan dan Hibah Barang Daerah Bagi Masyarakat Miskin	220,000,000
13	Kegiatan Pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin	Pembinaan Bagi Kelompok E-warung dan Kube	100,000,000

Sumber : Dinas sosial Kota Jambi, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, dengan Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang direalisasikan, Kota Jambi memiliki 13 program dan kegiatan yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat di Kota Jambi. Kegiatan tidak hanya dalam bentuk uang dan barang, namun juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun untuk meningkatkan tingkat produksi, konsumsi dan menciptakan Indeks Pembangunan Manusia.

4.6 Gambaran Ekonomi

Perkembangan ekonomi daerah bisa dilihat dari Produk Dalam negeri Regional Bruto(PDRB) Produk Dalam negeri Regional Bruto menggambarkan pembuatan yang dihasilkan oleh sesuatu warga dalam kurun waktu 1 tahun yang terletak di wilayah ataupun regional tertentu. Produk Dalam negeri Regional Bruto selaku salah satu penanda ekonomi memuat bermacam instrumen ekonomi yang didalamnya nampak dengan jelas kondisi makro ekonomi sesuatu wilayah dengan pertumbuhan ekonominya, pemasukan per kapita serta bermacam instrumen yang lain. Dimana dengan terdapatnya data- data tersebut hendak sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan serta penilaian sehingga pembangunan tidak hendak salah arah. Angka Produk Dalam negeri Regional Bruto sangat diperlukan serta butuh disajikan, sebab tidak hanya dapat

dipakai selaku bahan analisa perencanaan pembangunan juga ialah barometer buat mengukur hasil- hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Penyajian PDRB biasanya dilakukan dalam 2 (dua) bentuk ; PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk wilayah Kota Jambi, PDRB atas dasar harga berlaku sejak sepuluh terakhir alami jumlah peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 PDRB ADHB Perkapita Kota Jambi tahun 2010-2019 (Ribu Rupiah)

Tahun	PDRB perkapita Kota Jambi (Ribu Rupiah)
2010	20 711,63
2011	23 594,03
2012	26 500,97
2013	29 604,24
2014	33 407,50
2015	36 963,50
2016	41 827,00
2017	44 481,10
2018	48 369,10
2019	51 023,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jambi

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah PDRB ADHB perkapita Kota Jambi sejak sepuluh terakhir alami jumlah peningkatan sekitar 0,11 persen tiap tahunnya. Jumlah tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 51.023,76 . Jumlah peningkatan pada tahun tersebut di peroleh dari Pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh karena karakter kekotaan yang dimiliki oleh Kota Jambi, dimana kegiatan pertanian bukanlah kegiatan yang dominan sebagai mata pencaharian penduduk Kota Jambi.